



PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL DAN PENGELUARAN KONSUMSI MASYARAKAT TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

THE INFLUENCE OF FISCAL POLICY AND PUBLIC CONSUMPTION EXPENDITURE ON ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA

**Diah Ayu Permata¹, Hanifuan Maharani Margiyanata², Lutfia Salsabila Bani³,
Henri Noviarita^{4*}**

^{1,2,3,4} Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung
Email: diahayupermata01@gmail.com¹, hanifuan603@gmail.com², lutfiasalsabila444@gmail.com³,
heninoviarita@radenintan.ac.id^{4*}

Article history :

Received : 14-11-2024
Revised : 15-11-2024
Accepted : 17-11-2024
Published: 20-11-2024

Abstract

This article analyzes the impact of fiscal policy and public consumption expenditure on economic growth, analyzing the relationship between public consumption expenditure and government spending in the context of the Indonesian economy. This study shows that, through government spending and tax revenues, fiscal policy also has a significant role in managing the economy. Because the amount of tax revenue is smaller than spending needs, central government spending usually increases from year to year. This research, using secondary data and descriptive analysis, found that government spending greatly influences public consumption. The results show that the impact of fiscal policy, especially in the infrastructure and social sectors, can increase people's purchasing power. According to this research, synergy between public and government consumption expenditure is very important for sustainable economic growth.

Keywords : Fiscal Policy, Economy, Consumption, Society

Abstrak

Artikel ini menganalisis dampak kebijakan fiskal dan pengeluaran konsumsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi, menganalisis hubungan antara pengeluaran konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah dalam konteks perekonomian Indonesia. Studi ini menunjukkan bahwa, melalui pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak, kebijakan fiskal juga memiliki peran yang signifikan dalam mengelola perekonomian. Karena jumlah penerimaan pajak lebih kecil daripada kebutuhan belanja, belanja pemerintah pusat biasanya meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini, dengan menggunakan data sekunder dan analisis deskriptif, menemukan bahwa pengeluaran pemerintah sangat mempengaruhi konsumsi masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa dampak kebijakan fiskal, terutama di bidang infrastruktur dan sosial, dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Menurut penelitian ini, sinergi antara pengeluaran konsumsi masyarakat dan pemerintah sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Kebijakan Fiskal, Perekonomian, Konsumsi, Masyarakat



PENDAHULUAN

Pengeluaran Pemerintah dan Kebijakan Fiskal

Untuk mempercepat pembangunan ekonomi negara berkembang, pemerintah memainkan peran penting. Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan ekonomi mengenai pendapatan dan pengeluaran guna mencapai tujuan seperti pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi. Perubahan besaran dan klasifikasi anggaran pemerintah, baik pajak maupun belanja pemerintah, dapat berdampak pada variabel permintaan agregat (Soleh & Anitasari, 2014).

Kebijakan fiskal mencakup pengeluaran pemerintah, yaitu langkah pemerintah dalam mengatur perekonomian dengan cara menetapkan total pendapatan dan pengeluaran pemerintah setiap periode, yang terlihat dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau wilayah. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk menstabilkan harga, level output, kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan fiskal adalah tindakan pemerintah yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran uang (Syamsi, 1983). Dasar dalam pemikiran kebijakan fiskal ialah bahwa pemerintah dan individu tidak akan sama tindakan ataupun dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Umumnya individu akan mengurangi output jika penerimaannya menurun, sedangkan pemerintah tidak perlu melakukan hal yang sama, karena jika pemerintah meminimalisir pengeluarannya, maka tindakan ini justru akan menambah kesulitan bagi perekonomian karena menurunnya pengeluaran pemerintah akan berarti menurunnya income individu sebagai objek pajak dan selanjutnya malah akan mengurangi penerimaan pemerintah (Purwanti et al., n.d.). Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi demand agregat perekonomian dan sisi penawaran dalam jangka panjang dengan meningkatkan efisiensi perekonomian. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal berkaitan langsung dengan menjaga stabilitas makroekonomi (Surjaningsih et al., 2012). Dua jenis kebijakan fiskal ialah; ekspansif, yang menargetkan peningkatan investasi dan pengeluaran; dan kontraktif, yang menargetkan penurunan pengeluaran untuk menstabilkan inflasi. Teori Keynesian menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dapat mendorong investasi dan konsumsi masyarakat. Kedua hal ini akan menghasilkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Bruto (PDB) (Sari et al., 2024). Tapi, menurut *Ricardian Equivalence Hypothesis* (REH), kebijakan fiskal tidak selalu berdampak besar pada konsumsi masyarakat karena orang cenderung mengubah harapan mereka terhadap pajak di masa depan (Sholihah, 2020).

Dua bagian utama pelaksanaan otonomi daerah, yang dimulai pada bulan Januari 2001 untuk setiap daerah tingkat propinsi dan kabupaten, adalah pengalihan pengendalian dari pemerintah pusat kepada pemerintah regional guna menjalankan pemerintahan dan tanggung jawab untuk menciptakan dan mengelola sumber daya ekonomi, yang mencakup identifikasi potensi sumber pendanaan dan pembangian anggaran berdasarkan kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah. Kebijakan yang bertujuan memperkuat kemampuan daerah melalui



otonomi daerah akan memberi peluang bagi daerah untuk berkembang dan memperkuat perekonomiannya dari sisi ekonomi. Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal akan sangat dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan kewenangannya untuk mengendalikan dan mengawasi urusan daerah, daerah akan berusaha meningkatkan perekonomiannya sesuai dengan situasi, kebutuhan, dan kapasitasnya. Tujuan otonomi daerah dan kewenangan daerah adalah untuk memaksimalkan pelayanan kepada pelaku perekonomian daerah baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional.

Pengeluaran yang ditunjukkan dalam APBD oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dibagi menjadi dua kelompok utama: pengeluaran pembangunan atau belanja pelayanan publik dan pengeluaran rutin atau belanja aparatur daerah. Di sebagian besar daerah, belanja aparatur daerah merupakan jenis yang paling menonjol dalam pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin atau belanja aparatur daerah meliputi Belanja untuk pembangunan atau pelayanan publik dibagi menurut sektor-sektor pembangunan yang lebih berfokus pada akumulasi stok kapital. Namun, semua pengeluaran ini merupakan pengeluaran konsumsi. Pemerintah harus memperhatikan kondisi tersebut di atas dan meningkatkan alokasi pengeluaran pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran Konsumsi Masyarakat

Salah satu komponen makroekonomi yang menentukan jati diri pendapatan nasional adalah belanja konsumsi masyarakat. Metode pengeluaran menunjukkan bahwa variabel “konsumsi” sering dilambangkan dengan huruf C. Porsi pendapatan individu yang digunakan untuk konsumsi disebut tabungan, dan biasanya dilambangkan dengan simbol S (Tabungan). Total pengeluaran konsumsi suatu negara adalah jumlah penduduknya ketika total pengeluaran konsumsi warga negaranya dihitung. Konsumsi seseorang berkorelasi langsung dengan pendapatannya; dalam skala yang lebih besar, pengeluaran konsumsi publik berkorelasi langsung dengan PDB nasional. Oleh karena itu, konsumsi meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Karena perilaku menabung konsisten dengan pendapatan, baik konsumsi maupun tabungan akan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Rasio pengeluaran konsumsi baru terhadap tambahan pendapatan dikenal sebagai kecenderungan mengkonsumsi (*Marginal Propensity to Consume*, atau MPC). Namun, kecenderungan menabung (*Marginal Propensity to Save*, atau MPS) adalah rasio peningkatan pendapatan terhadap peningkatan konsumsi.

Masyarakat dengan perekonomian yang agak tidak stabil biasanya memiliki tingkat MPC yang relatif tinggi dan tingkat MPS yang relatif rendah. Hal ini berarti bahwa sebagian besar dana baru yang diterima akan dibelanjakan di komunitas-komunitas tersebut. Masyarakat dengan perekonomian yang agak stabil akan mengalami hal yang sebaliknya. Dibentuk. Ukuran relatif MPC dan MPS tidak hanya menunjukkan variasi antara masyarakat mapan dan belum menetap di negara-negara industri dan negara berkembang, namun pola konsumsinya sendiri juga menunjukkan perbedaan-perbedaan ini. Mereka yang belum mapan biasanya mempunyai pola konsumsi yang didominasi oleh pemenuhan kebutuhan pokok. Sebaliknya, masyarakat yang sudah



mapan biasanya mendedikasikan sebagian besar pengeluaran konsumsinya untuk memenuhi kebutuhan sekunder atau bahkan tersier.

Belanja agregat atau belanja publik untuk barang dan jasa, ialah salah satu komponen penentu utama keberhasilan perekonomian suatu negara, menurut Keynes. Baik dalam periode yang singkat maupun berkelanjutan, keputusan pembelian suatu individu mempunyai pengaruh yang besar terhadap aktivitas perekonomian. Meskipun keputusan belanja rumah tangga pada akhirnya akan mempengaruhi variabel makroekonomi lainnya, variasi konsumsi jangka pendek mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi. Karena konsumsi biasanya mencapai antara 50 dan 75% PDB, perubahan pengeluaran rumah tangga dari waktu ke waktu mempunyai dampak yang signifikan terhadap perubahan aktivitas perekonomian. Pendapatan dan konsumsi mempunyai hubungan yang proporsional; Artinya, semakin besar income suatu individu, semakin tinggi pula kemungkinannya untuk membelanjakan lebih banyak uang (Persaulian et al., 2013).

Pertumbuhan Ekonomi

Elemen paling penting dalam pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang diperoleh diterapkan untuk menilai progres kemajuan suatu negara atau wilayah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk provinsi dan kabupaten/kota, serta Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional, merupakan persentase umum yang digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi. PDRB adalah total output yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam periode waktu tertentu, atau total nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit usaha di suatu wilayah tertentu (Noviarita et al., 2021).

Pembangunan industri merupakan permasalahan jangka panjang suatu negara yang sedang mencapai kondisi lebih baik dalam periode tertentu. Pembangunan industri erat kaitannya dengan peningkatan kapasitas produksi suatu negara yang dimaknai sebagai pendapatan nasional (Indahsari et al., 2023). Pertumbuhan ekonomi disebut sebagai progres kegiatan ekonomi yang mengakibatkan peningkatan total output masyarakat (Sukirno, 2013). Pertumbuhan ekonomi adalah istilah yang dipakai untuk menjelaskan kemajuan fiskal yang berhubungan dengan produksi barang dan jasa suatu negara. Contoh dari kemajuan ini termasuk peningkatan hasil barang-barang industri dan total hasil, pembangunan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, produksi lebih banyak jasa, dan produksi lebih banyak barang-barang industri. Kenaikan tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil berfungsi sebagai indikator tingkat pembangunan atau pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Sektor pertanian tradisional, kurangnya modal, minimnya tenaga kerja terdidik dan terlatih, peningkatan populasi, dan sejumlah masalah kelembagaan, sosial, budaya, dan politik merupakan penyebab utama permasalahan pembangunan di negara-negara berkembang. Mencapai pertumbuhan ekonomi memerlukan stabilitas politik dan ekonomi. Untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, kebijakan dan strategi pemerintah yang mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki juga merupakan hal yang penting.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah dengan menggunakan teknik kualitatif deskriptif analisis. Pendekatan ini dipilih karena mendukung peneliti mengumpulkan, memeriksa, dan mengevaluasi informasi dari berbagai sumber terkait, termasuk buku, jurnal, makalah ilmiah, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan industri di Indonesia pada Era Otonomi daerah dapat mengatasi semua tantangan globalisasi ekonomi dunia dan mampu memprediksi modifikasi yang terjadi. Secara nyata, pembangunan ekonomi masyarakat harus dilakukan melalui berbagai program, termasuk pembangunan Industri Kecil dan Menengah atau biasa disebut IKM (BPS, 2018) Industri ini juga merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting (Pramana et al., 2022). Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat ini menunjukkan hasil yang positif, dalam lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang signifikan terutama dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pandemi COVID-19. Dalam ringkasan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2019 mencapai 5,02%, sedikit menurun dari 5,17% pada tahun sebelumnya, yang mencerminkan tantangan yang dihadapi perekonomian global. Akibat pandemi COVID-19 dan pembatasan sosial yang mengganggu aktivitas ekonomi, pertumbuhan tahun ini menjadi titik terendah dengan pertumbuhan negatif sebesar -2,07%. Ekonomi mulai pulih pada 2021 dengan pertumbuhan 3,70%. Meskipun pandemi terus berlangsung, ada tanda-tanda pemulihan dari aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 5,31%, melampaui target pemerintah sebesar 5,2%, didorong oleh peningkatan ekspor dan impor. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 sebesar 5,05% menunjukkan ketahanan dan stabilitas perekonomian setelah pandemi. Meskipun mengalami kontraksi di tahun 2020, Indonesia berhasil menunjukkan pemulihan yang kuat dalam dua tahun berikutnya, dengan pertumbuhan yang stabil di atas 5% pada tahun 2022 dan 2023. Data ini mencerminkan ketahanan perekonomian Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan domestik.

Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penggunaan input dan output pemerintah untuk menjangkau pembangunan industri dan stabilitas dikenal sebagai kebijakan fiskal. Salah satu alat utama yang digunakan pemerintah untuk mendorong pembangunan industri adalah kebijakan fiskal. Irawan menyatakan bahwa tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mendorong investasi yang optimal secara sosial dan meningkatkan laju investasi, yang keduanya dapat mendorong pembangunan industri secara keseluruhan. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana kontrol negara terhadap pendapatan dan belanja mempunyai dampak besar terhadap dinamika perekonomian (Edi Irawan, 2023).

Menurut penelitian Manik, kebijakan fiskal Indonesia mempunyai dampak jangka pendek dan jangka panjang yang besar terhadap permintaan agregat. Selain meningkatkan konsumsi dan investasi lokal, strategi ini juga membantu menjaga stabilitas ekonomi dalam menghadapi



gangguan dari luar. Penelitian mereka menunjukkan pengaruh signifikan kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jika dilakukan dengan benar (Wulandari Manik et al., 2024).

Pandemi COVID-19 telah menjadikan kebijakan fiskal menjadi semakin penting. Menurut Ma'ruf dan Andriansyah, langkah-langkah fiskal yang dianggap ekspansif, seperti peningkatan belanja negara dan pemberian insentif fiskal, dapat berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi meski dalam kondisi sulit. Tindakan-tindakan ini tidak hanya menstimulasi perekonomian namun juga mengurangi dampak buruk pandemi terhadap perekonomian Indonesia (Rizal Ma'ruf & Andriansyah, 2022).

Penelitian menunjukkan bahwa elemen kebijakan fiskal termasuk pajak, pengeluaran pemerintah, dan subsidi mempunyai dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan pendek. Studi mengungkapkan bahwa komponen kebijakan fiskal termasuk pajak, pengeluaran, dan subsidi dapat mempengaruhi dinamika perekonomian suatu negara. Analisis yang dilakukan di Indonesia dengan menggunakan teknik seperti *Error Correction Model* (ECM) dan *Vector Auto Regression* (VAR) menunjukkan bahwa investasi pemerintah, khususnya di sektor sosial dan infrastruktur, berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, belanja pegawai dan utang luar negeri biasanya mempunyai dampak negatif.

Kebijakan fiskal ekspansif, yang meliputi peningkatan belanja pemerintah dan pengurangan pajak, terbukti efektif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi saat kondisi ekonomi lesu. Hasil studi menunjukkan bahwa setiap peningkatan dalam pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) secara signifikan. Selain itu, kebijakan fiskal juga berfungsi untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga melalui pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara. Dengan demikian, pengelolaan kebijakan fiskal yang baik sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran konsumsi masyarakat memiliki peran sentral dalam menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Secara umum, konsep klasik ekonomi menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat merupakan motor utama dalam sistem ekonomi. Variabel pengeluaran konsumsi masyarakat sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, bahkan menjelaskan sekitar 54,4% dari total penjelasan tingkat pertumbuhan ekonomi, sedangkan 45,6% lainnya dijelaskan oleh variabel lain seperti investasi, ekspor, dan impor (Afiftah et al., n.d.).

Keynes menyatakan, bahwa hal penting yang mempengaruhi tingkat konsumsi dan tabungan adalah pendapatan. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan dipakai untuk membeli makanan, barang-barang kebutuhan, dan barang-barang tidak penting, sehingga meningkatkan permintaan keseluruhan dan akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi (Afiftah et al., n.d.). Peningkatan belanja konsumsi rumah tangga akan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga meningkatkan permintaan atas barang-barang lokal dan impor, yang pada akhirnya akan meningkatkan produksi dan pekerjaan, serta memicu siklus konsumsi yang berkelanjutan.



Selain itu, studi terkini menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti efek pameran internasional, gaya hidup mewah, dan kemampuan daya beli masyarakat. Contoh nyata adalah penelitian di Provinsi Kalimantan Barat yang menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat cukup dinamis dan berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi lokal. Belanja pemerintah juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun peran konsumsi masyarakat masih dominan dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi (Saputro, 2022). Dalam usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, strategi yang baik termasuk meningkatkan pendapatan masyarakat, mempermudah akses ke barang-barang penting, serta penerapan kebijakan fiskal yang mendukung konsumsi. Dengan cara ini, belanja konsumsi masyarakat akan tetap berperan sebagai penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Masa Pandemi COVID-19

Pemerintah menggunakan rekayasa fiskal untuk mengatasi pandemi COVID-19 baik dari pos pendapatan maupun belanja. Kementerian Keuangan Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2020 tentang stimulus perpajakan bagi seluruh wajib pajak pada pos pendapatan, khususnya pajak (Azimi, 2021). Kebijakan perpajakan yang telah diterapkan adalah sebagai berikut: 1) penurunan tarif pajak penghasilan badan secara progresif; 2) insentif perpajakan atas kepemilikan masyarakat di pasar modal; 3) perluasan prosedur administrasi perpajakan; dan 4) pengenaan pajak transaksi elektronik. Salah satu langkah praktis untuk memerangi pandemi Covid-19 adalah dengan memberikan insentif perpajakan guna menopang pembangunan ekonomi, produktivitas industri tertentu, dan daya beli masyarakat (Mirani et al., 2021). Selama pandemi, pendapatan pajak digunakan untuk mengendalikan aktivitas dan produksi industri tertentu selain sebagai pendapatan pemerintah (Tambunan, 2020).

Mayoritasantisipasi belanja barang dan jasa, termasuk perlengkapan kantor, perjalanan dinas, dan biaya operasional lainnya, menurun akibat pemberlakuan kebijakan bekerja dari rumah oleh pemerintah selama wabah Covid-19 karena seluruh operasional dialihkan ke internet platform. Demi menjaga kesehatan dan keselamatan semua orang serta menurunkan angka positif Covid-19, kebijakan WFH (*Work from Home*) ini diterapkan. (Onibala et al., 2021). Pemerintah melakukan realokasi dana selama pandemi Covid-19, menunda atau menghentikan operasi yang tidak banyak berpengaruh pada kondisi pandemi. Pendanaan proyek yang masih bisa dinegosiasikan untuk ditunda dapat menghemat pembiayaan modal pemerintah pada pos belanja modal sehingga menurunkan defisit anggaran. Dana tersebut kemudian dialokasikan pada bidang-bidang yang dianggap paling penting, antara lain pengadaan perbekalan kesehatan, reward bagi tenaga kesehatan, pembiayaan Kartu Prakerja, dan pemberian tarif listrik gratis (Feranika, 2020).

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Mankiw (2006:277), berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah adalah salah satu bagian dari pengeluaran, dan tingginya tingkat pengeluaran pemerintah akan mengarah pada pengeluaran



yang lebih besar secara keseluruhan. Konsumsi akan naik sejalan dengan naiknya pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan pemerintah.

Berdasarkan penelitian Rafiq, terdapat temuan penting mengenai hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pembangunan ekonomi. Hal ini menunjukkan pentingnya belanja konsumen pemerintah terhadap perekonomian. Pengeluaran konsumsi pemerintah memang hanya porsi kecil terhadap PDB, namun jika dimaksimalkan maka daya beli masyarakat akan meningkat sehingga akan mendorong perekonomian (Rafiq, 2016).

Salah satu contoh peningkatan pengeluaran pemerintah pada sektor infrastruktur dapat dilihat dari alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022, yang dianggarkan sebesar Rp125,9 triliun untuk belanja infrastruktur. Dari jumlah tersebut, realisasi belanja mencapai 93,6%, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sumber daya air. Penggunaan hampir seluruhnya produk dalam negeri (93,4%) mencerminkan dampak positif dari belanja ini terhadap perekonomian domestik, karena tidak hanya memperbaiki infrastruktur tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran khusus untuk pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang diharapkan dapat menyerap satu juta tenaga kerja. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur berfungsi sebagai pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pendapatan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Proses memperbaiki kondisi perekonomian suatu negara dalam waktu yang lama disebut pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat terlihat dari adanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi karena menunjukkan peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. (Eko Setiawan & Noviarita, 2023).

Pendapatan pajak memiliki peran yang kompleks dan multifaset dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meskipun tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, pajak memiliki kontribusi positif terhadap penerimaan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Penerimaan pajak Indonesia tidak selalu beriringan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Misalnya, pada periode 2007–2008, tingkat pertumbuhan penerimaan pajak meningkat dramatis (19,99% → 34,16%), sementara pertumbuhan ekonomi nasional relatif stabil (6,35% → 6,01%). Fenomena serupa juga terjadi pada tahun 2010–2011 dan 2015–2016, di mana pertumbuhan penerimaan pajak melemah, tetapi pertumbuhan ekonomi nasional tetap kuat.

Namun, pajak penghasilan (PPh) telah ditemukan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Estimasi menggunakan metode *Vector Auto Regression* (VAR) menunjukkan bahwa pajak



penghasilan memiliki koefisien yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Ramadhan et al., 2022).

Realisasi Penerimaan Pajak

Pada tahun 2023, penerimaan pajak Indonesia mencapai Rp1.109,1 triliun atau 64,6% dari target APBN 2023. Penerimaan ini tumbuh sebesar 7,8% secara tahunan, dengan Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas mencatat peningkatan 6,98% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) tumbuh 10,60%.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Fluktuasi harga komoditas dan aktivitas ekonomi global juga mempengaruhi penerimaan pajak. Misalnya, penurunan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Bea Keluar disebabkan oleh harga minyak sawit mentah yang rendah dan kebijakan flush-out tahun 2022. Meskipun demikian, penerimaan pajak tetap tumbuh positif, menunjukkan bahwa pajak memiliki kontribusi stabil terhadap penerimaan pemerintah.

Pendapatan pajak sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Walaupun tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi secara nasional, pajak penghasilan memberikan kontribusi yang baik dan berarti terhadap penerimaan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Strategi pengelolaan keuangan yang cermat dan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi global sangat diperlukan untuk memaksimalkan kontribusi pajak terhadap pertumbuhan ekonomi.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian tentang pengaruh kebijakan fiskal dan pengeluaran konsumsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia menunjukkan bahwa kedua faktor ini memiliki efek penting dan saling terkait dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan fiskal, melalui peningkatan belanja pemerintah di sektor infrastruktur dan program sosial, telah berkontribusi pada peningkatan permintaan agregat dan penciptaan lapangan kerja, yang pada gilirannya meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, pengeluaran konsumsi masyarakat yang naik juga memperkuat dampak positif dari kebijakan fiskal, menciptakan siklus pertumbuhan yang berkelanjutan. Walaupun terdapat tantangan seperti inflasi dan defisit anggaran, hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara kebijakan fiskal yang efektif dan pengeluaran konsumsi masyarakat yang tinggi dapat menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama dalam konteks pemulihan pasca-pandemi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus mengoptimalkan kebijakan fiskal dan mendukung konsumsi masyarakat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan saran dalam penulisan article ini, dan rasa hormat kami kepada para penulis dan peneliti yang karyanya tercantum dalam penulisan article ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Afiftah, A. T., Juliprijanto, W., & Destiningsih, R. (n.d.). *Analysis Of The Effect Of Government Consumption Expenditure And Household Consumption Expenditure In Indonesia In 1988-2017*.
- Azimi, A. (2021). Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2020. In *Jurnal Produktivitas* (Vol. 8). www.openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/jp
- Edi Irawan. (2023). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian: Suatu Kajian Literatur. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 2(2), 01–08. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v2i2.1898>
- Eko Setiawan, A., & Noviarita, H. (2023). Potensi dan strategi pengembangan kuliner halal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(7), 2023. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Feranika, A. H. D. (2020). *Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi Pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid-19*.
- Indahsari, L., Heni, N., & Fasa, M. I. (2023). *Energy Use, Economic Growth, Tourism On Co2 Emissions: Spatial Analysis*.
- Mankiw, N George. 2006. *Teori Makro Ekonomi Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.
- Mirani, K. P., Margareth, A. N., Cahyarani, N., & Maulana, A. (2021). The Government's Fiscal Policy Strategy To Improve The Economy Of Indonesia In The Covid-19 Pandemic Period. In *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi* (Vol. 5, Issue 2). <http://www.ejournal.pelitaIndonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Noviarita, H., Kurniawan, M., & Nurmalia, G. (2021). Analisis Halal Tourism dalam Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 302. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1574>
- Onibala, A., Rotinsulu, T. O., Pingkan, I., & Rorong, F. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. In *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* (Vol. 22, Issue 2).
- Persaulian, B., Aimon, H., & Anis, A. (2013). *Analisis Konsumsi Masyarakat Di Indonesia: Vol. I* (Issue 02).
- Pramana, W., Noviarita, H., & Anggraeni, E. (2022). *Analisis Digital Marketing dan Literasi Ekonomi Syariah Terhadap Pendapatan Pelaku Industri Kecil dan Menengah di Provinsi Lampung Melalui E-Commerce*. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5742>
- Purwanti, E., Izat Asya, F., Ani, F., Lusiana, D., & Noviarita, H. (n.d.). *APBN, Kebijakan Fiskal Dan Utang Luar Negeri (Studi kasus: Dampak Surat Utang Negara (SUN) Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Era Pandemi covid-19 Tinjauan Ekonomi Islam)*.
- Rafiq, M. (2016). *Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2001:T1-2010:T4*.
- Ramadhan, M., Aji, B., & Wijayanti, D. (2022). *Analisis Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*.
- Rizal Ma'ruf, M., & Andriansyah, E. H. (2022). Kebijakan Fiskal Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Fiscal Policy And The Impact On Indonesians Economic Growth During The Pandemic. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 10(3), 346–356.



- Saputro, F. B. H. M. ; S. M. S. ro. (2022). *Pengaruh Konsumsi Masyarakat Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Barat*.
- Sari, F. M., Astuti, A., Zamanda, D., Restu, P., & Fadilla, A. (2024). Kebijakan Fiskal dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia. In *Journal of Economics, Assets, and Evaluation* (Vol. 1, Issue 4). <https://economics.pubmedia.id/index.php/jeae>
- Sholihah, H. M. (2020). *Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Konsumsi Masyarakat Dalam Paradigma Ricardian Equivalence Hypothesis Di Indonesia*.
- Soleh, A., & Anitasari, M. (2014). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu*.
- Sukirno, Sadono. 2013. *Makro Ekonomi, Tori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.
- Surjaningsih, N., Utari, G. A. D., & Trisnanto, B. (2012). Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output Dan Inflasi. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 14(4), 389–420. <https://doi.org/10.21098/bemp.v14i4.365>
- Syamsi, Ibnu. 1983. *Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara* . Jakarta: Bina Aksara.
- Tambunan, M. R. U. D. (2020). *Kebijakan Perpajakan Di Indonesia Untuk Kemudahan Ekonomi Saat Masa Pandemi COVID-19*. <https://doi.org/10.25077/jakp>
- Wulandari Manik, C., Silaban, K., Putri Mnurung, M., Meylani Situmorang, R., Afentina Sinambela, R., & Sari Margaret Julianty Silaban, P. (2024). *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production E-Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Permintaan Agregat: Studi Kasus di Negara Indonesia*.